



Laporan singkat Audiensi IGJ ke Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta, 27 April 2021 - Indonesia for Global Justice Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi melakukan kunjungan virtual ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka audiensi menyampaikan pandangan masyarakat sipil mengenai kebijakan terkait Perdagangan Bebas yang semakin gencar dilakukan pemerintah. Dalam kesempatan ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi dihadiri oleh Rachmi Hertanti, Lutfiyah Hanim, Kartini Samon, Muslim, Maulana, Parid Ridwanudin, Dwi Susilo dan Agung Prakoso.

Audiensi ini diterima langsung oleh anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin AK yang didampingi staf ahli dari Fraksi PKS.

Dalam kesempatan ini, Lutfiyah Hanim menyampaikan sejumlah isu penting yang diadvokasi IGJ mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas sekaligus mengingatkan soal partisipasi publik dalam proses perjanjian perdagangan bebas yang merupakan mandat konstitusi sesuai dengan Putusan MK. Selama ini perundingan cenderung digelar tertutup dan minim akses oleh publik. bahkan beberapa perjanjian perdagangan bebas dan investasi disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR RI seperti yang terjadi pada perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia-Singapura yang hanya disahkan melalui Perpres.

Publik tidak mengetahui apa yang sedang dirundingkan dan seperti apa perkembangannya. Publik hanya mengetahui sangat sedikit informasi melalui media yang biasanya hanya mengutip rilis dari Pemerintah.

Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjian di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menambahkan beberapa hal penting dalam perjanjian perdagangan bebas seperti investasi dan perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, isi perundingan Bilateral Investment Treaty seringkali isinya tidak seimbang antara hak dan kewajiban Investor. Negara punya banyak kewajiban dan minim hak, investor banyak hak tapi tidak ada kewajiban. Di dalam FTA juga terdapat perlindungan kekayaan intelektual yang bertujuan memperluas dan memperpanjang hak monopoli. engan monopoli obat yang diperluas dan diperpanjang, akan meningkatkan harga obat, ketersediaan dan keterjangkauan.

Analisis Pemerintah mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas sangat terbatas hanya mencakup perdagangan barang ekspor-impor. Padahal sebagian besar perjanjian membahas isu lain seperti pembukaan pasar jasa, liberalisasi, investasi, penyediaan barang Pemerintah dan penguatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Secara umum, IGJ dan Koalisi MKE mendorong agar Fraksi PKS dapat secara aktif mengkritisi isu perjanjian perdagangan bebas. Selain itu Fraksi PKS terutama di Komisi VI DPR-RI diharapkan dapat mendorong keterlibatan publik yang lebih luas di dalam proses ratifikasi perjanjian perdagangan bebas terutama RCEP yang akan masuk proses ratifikasi dalam waktu dekat.



IGJ dan Koalisi MKE merekomendasikan agar DPR-RI melakukan kajian analisis dampak secara komprehensif terhadap perjanjian yang telah diratifikasi dan akan diratifikasi. Komisi VI juga diharapkan Membangun mekanisme konsultasi publik yang demokratis dari awal perundingan hingga proses ratifikasi dan menggelar mekanisme pertemuan dengan kelompok masyarakat sipil untuk isu perjanjian perdagangan internasional.